

# JURNAL PRAXIS IDEALIS

Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan

VOL. 02 NO. 01 | 2025

DOI : [HTTPS://DOI.ORG/10.36859/JP.V2I1.3133](https://doi.org/10.36859/JP.V2I1.3133)

P-ISSN XXXX-XXXX E-ISSN XXXX-XXXX



Received : 09 Januari 2025 Accepted : 13 Februari 2025 Published : 17 Februari 2025

## PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM RANGKA KETERTIBAN PARKIR DI KOTA CIMAHI

**Aditya Najib Alfiqri<sup>1)</sup>, Tinda Irawaty<sup>2)</sup>, Agustina Setiawan<sup>3)</sup>**

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

### Abstrak

Fenomena dalam penelitian ini terfokus pada terjadinya parkir liar di zona larangan parkir di Kota Cimahi, adapun masalahnya belum optimal melakukan evaluasi di setiap bagian Dinas Perhubungan, belum mewujudkan lahan parkir yang di butuhkan oleh masyarakat Kota Cimahi. Ditinjau dalam teori pilar pengawasan berdasarkan dimensi 1)Pemantauan 2)Penegakkan 3) Evaluasi 4)Pendidikan dan Informasi. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisa Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Rangka Ketertiban Parkir Di Kota Cimahi. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan terdiri dari : Pemerintah Kota Cimahi, Kepala seksi beserta staff jajaran Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Juru Parkir dan Masyarakat Kota Cimahi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian, bahwa pengawasan dinas perhubungan dalam rangka melakukan ketertiban parkir belum berjalan optimal, hal ini dapat dilihat dari beberapa dimensi yaitu: belum adanya kebijakan penegakkan berkelanjutan seperti towing, Minimnya pengetahuan pengendara terkait parkir kendaraan dan belum mewujudkan lahan parkir yang di butuhkan oleh masyarakat Kota Cimahi.

**Kata Kunci :** Pengawasan, Dinas Perubungan, Ketertiban Parkir, Kota Cimahi.

### Abstract

The phenomenon in this research focuses on the occurrence of illegal parking in the no-parking zone in Cimahi City. The problem is that evaluations in each section of the Transportation Department have not been optimal, and the parking space needed by the people of Cimahi City has not yet been created. Reviewed in the pillar theory of supervision based on dimension 1) Monitoring 2) Enforcement 3) Evaluation 4) Education and Information. The aim of the research is to describe and analyze the Transportation Department's supervision in the context of parking order in Cimahi City. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques through: observation, interviews, and documentation. The

*informants consisted of: Cimahi City Government, section heads and staff from the Cimahi City Transportation Service, parking attendants and the Cimahi City Community. Data analysis techniques use data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the research show that the supervision of the transportation department in order to enforce parking order has not been optimal, this can be seen from several dimensions, namely: the absence of sustainable enforcement policies such as towing, the lack of driver knowledge regarding vehicle parking and the lack of parking spaces needed by the city community. Cimahi.*

**Keywords:** Supervision, Transportation Service, Parking Order, Cimahi City.

## **PENDAHULUAN**

Parkir merupakan tindakan menempatkan kendaraan pada suatu tempat dengan menghentikan dan membiarkan kendaraan dalam sementara waktu di area yang ditetapkan. Terdapatnya parkir liar dengan kondisi di area bahu jalan merupakan suatu praktik parkir kendaraan di area yang bukan merupakan tempat parkir resmi atau legal. Hal ini seringkali terjadi di tempat umum seperti trotoar, taman, atau area hijau, yang seharusnya tidak digunakan untuk parkir. Parkir liar dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas, merugikan pejalan kaki, dan menciptakan ketidaknyamanan serta masalah lingkungan.

Semakin tingginya parkir liar di suatu kota akan semakin tinggi kemacetan lalu lintas yang menyusutkan ruang untuk pergerakan kendaraan lainnya. Selain itu, seringkali menghambat pejalan kaki dan merugikan aspek estetika kota, berdasarkan kota ini adalah kota cimahi yang terletak di provinsi Jawa Barat. Kota Cimahi terdapat 3 wilayah yaitu Cimahi Selatan, Cimahi Tengah, Cimahi Utara. Di Kota Cimahi masih terdapat banyak pengendara yang masih melakukan parkir liar di area bahu jalan dan tidak menaati peraturan parkir.

pertumbuhan penduduk di Kota Cimahi seperti data yang dilansir pada website resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bahwa Kota Cimahi pada tahun 2024 menjadi salah satu daerah di Jawa Barat dengan penduduk yang paling padat. Tercatat bahwa Kota Cimahi dihuni oleh 566.537 jiwa yang tersebar di 3 Kecamatan (Opendata.cimahikota.go.id, 2024). Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi

tentu akan memiliki tingkat pergerakan penduduk dalam menggunakan transportasi yang tinggi pula. Artinya, infrastruktur jalan memiliki andil yang paling banyak dalam menunjang mobilitas masyarakat.

Pada tahun 2023 tercatat kendaraan roda 2 dan roda 4 di Kota Cimahi sebanyak 318.577 unit, lalu mengalami kenaikan menjadi 1.919 kendaraan dengan jumlah total 322.496 unit pada tahun 2024. Meningkatnya jumlah kendaraan menjadi salah salah satu bukti bahwa di Kota Cimahi Data tersebut memperkuat bahwa terjadi pertumbuhan populasi sehingga meningkatnya kebutuhan transportasi masyarakat dalam melakukan mobilitas kesehariannya mengakibatkan volume kendaraan kemacetan di ruas jalan. Dalam menyeimbangkan dari bertambahnya kendaraan di Kota cimahi.

Menurut data Dinas Perhubungan Kota Cimahi (2024) Jumlah Titik Parkir di Kota Cimahi Tahun 2023 – 2024 yang dihimpun ada 10 area seperti jalan Gandawijaya, Alun-Alun Timur, Mahar Martanegara dll mencapai 86 tempat parkir liar di Kota Cimahi. Maraknya pengendara yang memarkirkan kendaraan di sekitar bahu jalan dan mencerminkan melanggaranya ketentuan penyelenggaraan perparkiran. Masalah parkir liar sulit diatasi karena umumnya terjadi akibat kurangnya kesadaran tertib parkir pengendara, area bahu jalan bebas cone, maraknya juru parkir bodong, kurangnya pengawasan penyelenggara parkir dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai seksi perparkiran kota petugas parkir dan kurangnya pemahaman pengendara mengenai larangan parkir di dalam bahu jalan maupun sekitar area jembatan di belokan/perempatan sebagai upaya tertib parkir akibat parkir liar d Kota Cimahi.

Untuk itu pentingnya bagi pemerintah yaitu Dinas Perhubungan Kota Cimahi untuk mengambil langkah-langkah yang efektif guna mengatasi ketertiban parkir dan menjalankan tugas dan fungsinya dalam menindaklanjuti hal tersebut. Pentingnya pengawasan penyelenggaraan perparkiran yang dilakukan Dinas Perhubungan dengan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyelenggaran Perparkiran pada pasal 15 dicantumkan bahwa Dinas

perhubungan pada seksi perparkiran mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut;

- a. Menyusun rencana kerja seksi
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan perparkiran
- c. Menyiapkan bahan pembinaan pengelola parkir bagi perorangan, badan dan juru parkir.
- d. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pengelola parkir kendaraan bermotor maupun tidak bermotor.
- e. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pemungutan retribusi parkir.
- f. Melaksanaan pembukuan dan penyetiran pendapat retribusi parkir.
- g. Melaksanakan koordinasi penyelanggaran perparkiran dengan isntansi terkait.
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Mengacu pada tugas dan fungsi seksi perparkiran dan permasalahan penelitian pengawasan ketertiban parkir di Kota Cimahi yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa:

1. Kurangnya atau lemahnya pengawasan Seksi perparkiran Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas koordinasi penyelanggaran perparkiran dengan instansi terkait
2. Tidak melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi sehingga terjadinya pelanggaran ketertiban parkir di Jalan Raya Kota Cimahi.
3. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai ketertiban parkir dan tidak ada komunikasi secara dua arah antara masyarakat dan juru parkir sebagai petugas lapangan yang membuat ketertiban parkir sulit berjalan lagi secara optimal.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat judul Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Rangka Ketertiban Parkir Di Kota Cimahi.

Berdasarkan permasalahan yang ada, peneliti menggunakan teori Menurut Nawawi (1989) untuk melihat sejauh mana tingkat pengawasan Dinas Perhubungan dalam rangka ketertiban parkir di Kota Cimahi, terdapat 4 (empat) indikator dalam pilar aktivitas dalam pengawasan ketertiban parkir menurut Menurut Nawawi (1989) dalam Nurrahman (2017) yaitu, Pemantauan, Penegakan, Evaluasi, dan Pendidikan dan informasi. Menurut peneliti keempat variabel tersebut sesuai untuk digunakan dalam mengukur tingkat Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Rangka Ketertiban Parkir Di Kota Cimahi.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena pendekatan ini mampu mengungkapkan dan menelaah permasalahan dengan menggambarkan dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi berdasarkan fakta. Unit analisis dalam penelitian ini adalah instansi Dinas Perhubungan Kota Cimahi. Informan dalam penelitian ini yaitu yang berkaitan dengan pengawasan Dinas Perhubungan dalam rangka ketertiban parkir di Kota Cimahi maka informan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota Cimahi, Kepala seksi beserta staff jajaran Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Juru Parkir dan Masyarakat Kota Cimahi. Untuk mendapatkan data dalam penelitian kualitatif, ada berbagai teknik pengumpulan data yang dapat digunakan oleh peneliti, yaitu: 1) Observasi, 2) Wawancara, dan 3) Dokumentasi. Adapula teknik analisis yang digunakan oleh peneliti, yaitu: 1) Reduksi Data, 2) Penyajian Data, dan 3) Penarikan Kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

Pengawasan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi suatu daerah dalam menjalankan suatu kebijakan dengan upaya meningkatkan tata letak kota yang indah, nyaman aman dan tertib sesuai pada peraturan

tertulis. Melalui pengawasan, maka suatu permasalahan di suatu kota mengenai perparkiran atau parkir liar diharapkan bisa selesai diatasi. Hampir setiap daerah atau kota yang ada di Indonesia memiliki masalah yang sama terkait ketertiban parkir pengendara, dan tidak kecuali Kota Cimahi.

Kota Cimahi juga memiliki permasalahan yang cenderung kompleks jika berbicara tentang tempat parkir. Walaupun memiliki banyak peraturan dan berbagai upaya dalam mengatasi ketertiban parkir, nayatanya masih sama saja, permasalahan tersebut tidak kunjung selesai. Hingga pada akhirnya Pemerintah Kota Cimahi memperbaikhi upaya pengawasan melalui peringatan rambu lalu lintas tertera, pantauan juru parkir, pengembokan hingga pengangkutan kendaraan

Hal tersebut telah diterapkan, tetapi dapat terlihat dari sepanjang ruas jalan kota Cimahi masih adanya parkir liar, sehingga mengurangi kenyamanan pejalan kaki, pengendara lain yang melintas dan estetika di Kota Cimahi. Juga kurangnya fasilitas parkir yang memadai antara jumlah kendaraan yang memerlukan tempat parkir dibandingkan luas tempat parkir dan titik parkir yang diatur dan disiapkan oleh pemerintah Kota. Dan yang terakhir adalah kurangnya pemahaman masyarakat dan pengendara mengenai pentingnya ketertiban parkir yang menyebabkan parkir liar.

Berdasarkan hasil penelitian, Terlaksananya suatu pemantauan aktivitas menurut Nawawi harus dilakukan secara langsung dengan cara melihat langsung di lapangan untuk mengetahui jika adanya permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan suatu kegiatan. Hasil observasi dalam pemantauan di Kota Cimahi bahwa di ruas titik parkir dan jalan wilayah 3 kecamatan di Kota Cimahi, yaitu tidak ditemukan cctv di setiap bagian ruas titik parkir, tidak ada pemantauan operasi petugas parkir untuk patrol di lokasi larangan parkir, tidak ada ranjau dapat menahan pengendara parkir liar yang melintasi garis tersebut, dan adapun kesempatan juru parkir liar diluar operasional juru parkir dinas perhubungan yang membebaskan parkir liar. Berdasarkan penjelasan diatas artinya tidak seluruhnya pemantauan bisa di lakukan yang memang fokus dalam melakukan hal tersebut dalam upaya mengatasi ketertiban parkir di Kota Cimahi. Terbukti pada hasil dari

survei lapangan, peneliti menemukan masih banyak titik parkir liar yang tidak terpantau dari juru parkir Dinas Perhubungan Kota Cimahi.

Penegakkan atau tindakan langsung berarti bahwa pelaksana kebijakan perparkiran harus mampu mengeksekusi dan menjalankan pengawasan secara tegas. Hal ini melibatkan seseorang untuk menegur atau memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar aturan parkir, maka diperlukan adanya upaya pembuatan prosedur hukum atau sanksi. Dalam hal ini dinas perhubungan perlu melakukan suatu upaya tindak tegas terhadap pelanggar saksi yang melibatkan pihak lain, dengan harapan bisa memberi efek jera pengendara.

Penegakan di Kota Cimahi belum dilakukan secara optimal dari berbagai pihak terkait, sebab membutuhkan banyak aksi dan persetujuan dari kebijakan selanjutnya terhadap pengawasan ketertiban parkir di Kota Cimahi, Hal ini merupakan pembahasan dan pengesahan penegakkan ketertiban parkir bisa dilakukan secara optimal untuk dilakukan secara rutin dan dilakukan secara langsung kepada pengendara maupun pihak petugas lapangan yang lalai akan tugas maupun tanggung jawab atas kendaraan parkir liar.

Sebuah kebijakan membutuhkan evaluasi untuk mengukur sukses atau tidaknya dari kebijakan pengawasan sebelumnya dan sejauh mana rencana kerja pengawasan terlaksana sebagaimana yang diharapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi bisa mencapai tujuan. Melalui evaluasi akan terukur manakah hal yang tepat atau tidak dilakukan saat ini dan seterusnya untuk mencapai tujuan dan melibatkan Teknik sarana lapangan

Peneliti melakukan wawancara terhadap Ibu Alfi Staff Perparkiran Lapangan Kota Cimahi mengatakan, “Tindakan evaluasi pemahaman kepada sumber daya manusia seperti Juru parkir, Petugas Parkir, Petugas retribusi Parkir memang belum kami lakukan secara optimal dan intens, kami akan mencoba evaluasi terkait sikap mereka bekerja di lapangan dalam mengawasi ketertiban parkir”

Di Kota Cimahi Evaluasi tidak dilakukan secara rutin dalam mengevaluasi pengawas ketertiban parkir di lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa dalam tindakan evaluasi kebijakan atau program

pengawasan dinas perhubungan dalam ketertiban parkir di Kota Cimahi belum sering dilakukan, dampaknya akan sangat terasa apabila evasluasi kinerja atau program pengawasan rutin dilakukan. Hal tersebut membutukan bahwa evaluasi etos pengawasan dan pemahaman petugas parkir belum dilakukan secara rutin dan optimal sehingga belum bisa terukur apakah petugas parkir memiliki pemahaman yang komitmen yang tinggi.

Dalam pendidikan dan infromasi merupakan suatu upaya mememberikan pemahaman kepada masyarakat terkait ketertiban parkir, Hal ini dilakukan dalam bentuk edukasi yang berusaha mebentuk pemahaman, maupun menyebarkan informasi kepada masyarakat. Melalui pendidikan dan informasi diharapkan akan muncul respon dari masyarakat. Melalui Pendidikan, pelatihan maupun informasi tingkat lanjut yang akan dapat dikatahui apakah nantinya sanksi dapat diberikan kepada masyarakat baik petugas parkir yang lalai akan tugasnya apabila telah di berikan pendidikan dan informasi yang sosialisasikan oleh dinas perhubungan seksi perparkiran.

Pendidikan dan informasi yang dilakukan oleh dinas perhubungan dalam upaya pengawasan ketertiban parkir di Kota Cimahi belum dilakukan secara menyeluruh dan optimal di terima oleh masyarakat. Kurangnya sumber daya penjunjang untuk dapat mengdukasi masyarakat betapa pentingnya tertib dalam berkendara. Dengan poin diatas sudah bisa terpenuhi dan berjalan optimal sebagaimana mestinya, maka seharusnya pengawasan ketertiban.

## **KESIMPULAN**

Dalam proses pemenatauan sangat penting dilakukan pada seluruh jalan raya yang rawan di pakai titik parkir liar, berdekatan dengan pusat keramaian dan area yang tidak diperknangkan adanya parkir liar. Tetapi di Kota Cimahi belum seluruh titik tersebut memeliki kamera pengawas (cctv), rambu parkir yang lengkap dan hadirnya juru parkir liar, hal tersebut di nyatakan oleh informan. penegakkan di lapangan terdapat oknum lain di luar petugas perparkiran atau bagian dari petugas lapangan bagian dari pegawai dinas perhubungan yang memberi kesempatan untuk parkir liar tersebut. Kurangnya penegakkan dan atas dasar kelalaian menyebabkan Tingkat pengawasan yang dianggap belum optimal. pada tahap evaluasi atas pengawasan ketertiban parkir saat ini nyatanya belum berhasil terukur sukses, efektiif dan efisien. Sebab, masih banyaknya kendara yang melakukan parkir liar eskipun sudah dilakukan penambahan titik parkir. Lalu dalam pendidikan dan infromasi merupakan suatu upaya memberikan

pemahaman kepada masyarakat terkait ketertiban parkir, Tetapi nyatanya Pendidikan dan Informasi terkait ketertiban parkir di di Kota Cimahi hanya dilakukan sesekali pada media social, kemudian bukan pada akun resmi mereka. Belum dilakukannya secara menyeluruh melalui sosialisasi dan edukasi secara langsung kepada masyarakat. Kurangnya pendidikan dan informasi di cerminkan dengan parkir liar, lalu pengetahuan dan sikap yang menyepelekan terkait rambu lalu lintas, area titik parkir, zona merah, zona kuning dan garis berbiku belum diketahui secara jelas oleh masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Nawawi, H. 1989. Pengawasan Melekat Di Lingkungan Aparatur Pemerintah. Jakarta : Erlangga
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyelenggaran Perparkiran pada pasal 15
- <https://cimahikota.bps.go.id/indicator/153/305/1/luas-wilayah-kota-cimahi.html>